Tripartit Historiografi Asia Tenggara: George Cœdès, Hindia Belanda, dan Siam (1910–1930)

Pada awal abad ke-20, studi mengenai sejarah, arkeologi, dan epigrafi Asia Tenggara mengalami transformasi yang sangat mendalam dan radikal. Bergerak menjauh dari sekadar keingintahuan antikarian yang mendominasi abad ke-19, periode antara tahun 1910 hingga 1930 melahirkan pendekatan filologis dan arkeologis yang sangat ketat dan ilmiah terhadap masa lalu kawasan ini. Di pusat revolusi historiografis ini berdirilah seorang ilmuwan Prancis bernama George Cœdès, yang kariernya secara unik menjembatani tiga wilayah politik dan intelektual yang sangat berbeda: aparatur kolonial Prancis melalui *École française d'Extrême-Orient* (EFEO), birokrasi kerajaan dari Kerajaan Siam yang merdeka, dan institusi-institusi akademik serta ekstraktif dari Hindia Belanda.[1]

Melalui jaringan korespondensi ilmiah yang sangat rumit, misi-misi diplomatik kebudayaan, dan kolaborasi antar-institusi, Cœdès secara fundamental membentuk ulang pemahaman modern mengenai negara-negara "yang ter-Indianisasi" (Indianized states) di Asia Tenggara. Karyanya yang paling monumental, yaitu identifikasi terobosan pada tahun 1918 mengenai kemaharajaan maritim Śrīvijaya (Sriwijaya), memicu dialog lintas-imperium yang sangat intens yang melibatkan secara mendalam para arkeolog dan sejarawan Belanda terkemuka seperti Nicolaas Johannes (N.J.) Krom, J.Ph. Vogel, dan Willem Frederik Stutterheim.[4]

Laporan komprehensif ini menyajikan analisis yang mendalam mengenai dinamika ilmiah, institusional, dan geopolitik yang menghubungkan George Cœdès, Kerajaan Siam, dan tatanan kolonial Belanda. Eksplorasi ini akan mengungkap bagaimana pertukaran intelektual lintas batas, yang pada saat yang sama ditopang dan didanai oleh jaringan ekonomi kolonial, berhasil menempa paradigma-paradigma dasar dari sejarah Asia Tenggara, yang pada akhirnya memberikan legitimasi historis bagi negara-negara bangsa modern di kawasan tersebut.

Pelembagaan Warisan Sejarah dan Kebudayaan di Siam (1918–1929)

Meskipun George Cœdès sering kali dikaitkan secara eksklusif dengan lembaga penelitian Prancis EFEO, tahun-tahun paling formatif dari sintesis lintas-disiplinnya justru terjadi selama masa jabatannya sebagai pegawai negeri (abdi dalem) bagi pemerintah Siam.[7] Periode ini ditandai dengan adanya sinergi yang sangat langka antara metodologi akademik Eropa dan patronase kerajaan Siam, yang secara strategis ditujukan untuk mensistematisasi narasi sejarah bangsa tersebut di tengah tekanan imperialisme dari kerajaan-kerajaan kolonial di sekitarnya.

Perpustakaan Nasional dan Patronase Kerajaan Siam

Pada tahun 1918, Cœdès memindahkan basis operasionalnya ke Bangkok untuk mengambil alih posisi sebagai Direktur Perpustakaan Nasional Siam (yang dikenal sebagai Perpustakaan Vajirayana atau Watchirayan), sebuah posisi strategis yang ia pegang hingga tahun 1929.[1] Pengangkatannya ini bukanlah kebetulan akademis semata, melainkan sebuah tindakan diplomasi kebudayaan dan ketatanegaraan yang sangat terencana oleh monarki Siam. Di bawah bimbingan dan perlindungan Pangeran Damrong Rajanubhab—seorang tokoh intelektual raksasa yang sering dijuluki sebagai bapak sejarah Thai modern—Cœdès ditugaskan untuk mengatur, menerjemahkan, dan menafsirkan korpus naskah dan prasasti kuno yang sangat besar dalam bahasa Pali, Sanskerta, Khmer Kuno, dan Thai.[8]

Kolaborasi antara George Cœdès dan Pangeran Damrong bersifat sangat simbiotis dan saling melengkapi. Pangeran Damrong memiliki pengetahuan tangan pertama yang tidak tertandingi mengenai monumen-monumen kuno yang tersebar di seluruh provinsi di Siam, sementara Cœdès membawa keahlian filologis, linguistik, dan epigrafis tingkat tinggi dari Eropa.[8] Bersama-sama, mereka secara sistematis menghadapi dan mendekonstruksi asumsi-asumsi Orientalis Eropa yang lazim pada masa itu, yang sering kali mengaitkan keragaman seni dan arsitektur Asia Tenggara semata-mata sebagai produk dari migrasi kolonial India.[8] Mereka berdua merumuskan klasifikasi gaya benda-benda purbakala Siam yang tetap menjadi kanon hingga hari ini, membagi artefak dan monumen ke dalam tujuh gaya kronologis dan regional yang berbeda, yang dinamai berdasarkan wilayah kekuasaan kuno (*muang*) yang memerintah dari abad keenam hingga kelima belas.[8]

Sistematisasi ini memiliki implikasi geopolitik yang sangat krusial bagi Siam. Dengan membangun narasi evolusi seni dan politik yang koheren serta berkelanjutan, negara Siam memproyeksikan kedewasaan peradaban yang berfungsi sebagai benteng budaya dan legitimasi kedaulatan untuk menangkis perambahan kolonial lebih lanjut dari Prancis di timur (Indochina) dan Inggris di barat serta selatan (Malaya).[8]

Institut Kerajaan (Royal Institute) dan Siam Society

Momentum intelektual yang dihasilkan di Perpustakaan Nasional memicu pendirian Institut Kerajaan (Royal Institute) untuk Sastra, Arkeologi, dan Seni Rupa pada April 1926 oleh Pangeran Damrong.[10] Sebagai tanda penghargaan, kepercayaan, dan penghormatan yang sangat tinggi, Pangeran Damrong menunjuk Cœdès sebagai Sekretaris Jenderal Seksi Asing (Sekretaris Urusan Luar Negeri) dan sebagai penasihat utama arkeologi pada saat pendirian institusi tersebut.[9] Dalam kapasitas ini, Cœdès berfungsi sebagai diplomat budaya utama Siam, yang mewakili kepentingan sejarah dan purbakala Kerajaan Siam di berbagai forum internasional, termasuk di Batavia dan Berlin.[9]

Pada saat yang bersamaan, Cœdès memainkan peran yang sangat sentral dalam The Siam Society, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1904 di bawah patronase kerajaan (Raja Rama VI) untuk mempromosikan studi mengenai seni, ilmu pengetahuan, dan sastra Siam serta

negara-negara tetangganya.[12] Selama tahun 1920-an, Cœdès melayani sebagai editor *Journal of the Siam Society* dan pada akhirnya terpilih menjadi Presiden dari perhimpunan tersebut.[2] Di bawah kepemimpinannya, The Siam Society membina ikatan internasional yang kuat, menarik dukungan dan publikasi dari lembaga-lembaga paralel seperti *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Batavia) di Hindia Belanda, *Royal Asiatic Society*, dan *Società Asiatica Italiana*.[12] Jaringan institusional ini memastikan bahwa beasiswa dan historiografi Siam tidak terisolasi, melainkan secara aktif terintegrasi dan memengaruhi wacana regional yang lebih luas.

Tabel di bawah ini merangkum peranan dan posisi institusional Cœdès selama masa baktinya di Asia Tenggara yang menjembatani berbagai entitas politik:

Posisi / Jabatan	**Institusi**	**Masa Bakti**	**Signifikansi Institusional & Geopolitik**
Direktur / Kurator Kepala	Perpustakaan Nasional Siam (Vajirayana)	1918–1929	Menerjemahkan epigrafi dasar Asia Tenggara; menciptakan klasifikasi kronologis pertama untuk gaya seni Siam bersama Pangeran Damrong. Menerima gaji sebagai PNS Siam (1.000 baht/bulan). [1]
Editor & Presiden	*The Siam Society*	1920-an	Mengangkat *Journal of the Siam Society* ke standar akademik global; memperluas jaringan dengan sarjana Belanda dan Prancis. [2]
Sekretaris Jenderal (Urusan Luar Negeri)	*Royal Institute of Siam*	1926–1929	Bertindak sebagai perwakilan resmi dan duta arkeologi Siam dalam misi luar negeri, termasuk misi krusial ke Batavia pada tahun 1928. [1]
Direktur	*École française d'Extrême-Orient* (EFEO)	1929–1946	Mentransfer metodologi arkeologi antar-kolonial (seperti teknik anastilosis dari

			Jawa) kembali ke wilayah Indochina Prancis. [1]

Revolusi Epigrafis: Menyingkap Tabir Kemaharajaan Śrīvijaya

Keterlibatan lintas-imperium yang paling mendalam dan revolusioner dari karier George Cœdès terjadi tepat pada awal masa jabatannya di Siam. Pada tahun 1918, ia menerbitkan sebuah risalah monumental di jurnal *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* (BEFEO) Volume 18 yang berjudul "Le royaume de Çrīvijaya".[14] Publikasi tunggal ini tidak hanya mengubah historiografi maritim Asia Tenggara secara permanen, tetapi juga memicu perdebatan akademis yang sangat intens selama berpuluh-puluh tahun dengan para ahli Belanda di Batavia dan Leiden.[5]

Proses Intelektual Penemuan Sejarah

Sebelum tahun 1918, lanskap historis dari kepulauan Nusantara dan Semenanjung Malaya antara abad ke-7 dan ke-13 sangat terfragmentasi dan diselimuti oleh ketidaktahuan. Para cendekiawan dan ahli sejarah menyadari adanya referensi-referensi yang terisolasi dalam kronik-kronik dinasti Tiongkok mengenai sebuah entitas politik yang makmur bernama *Sanfoqi* (atau *Shilifoshi*), dan teks-teks navigasi Arab berbicara tentang seorang maharaja yang sangat kaya raya yang memerintah sebuah imperium yang disebut *Zābaj* atau *Sribuza*.[15] Lebih jauh lagi, para ahli epigrafi seperti sarjana Belanda Hendrik Kern telah, pada tahun 1913, menguraikan nama "Śrīvijaya" dari prasasti Kota Kapur berbahasa Melayu Kuno yang ditemukan di Pulau Bangka.[4] Namun, Kern dan para sejarawan Eropa lainnya secara keliru menafsirkan kata "Śrīvijaya" sebagai nama seorang raja tertentu, bukan nama sebuah negara berdaulat atau sebuah kerajaan maritim.[19]

Kegeniusan intelektual Cœdès terletak pada kemampuannya untuk mensintesis petunjuk-petunjuk linguistik, filologis, dan geografis yang sangat berbeda ini menjadi satu kesatuan narasi yang koheren. Beroperasi terutama sebagai seorang filolog dan ahli prasasti, ia memprakarsai studi formal tentang bahasa Melayu Kuno, mengenalinya sebagai *lingua franca* dan bahasa administratif dari mandala maritim yang luas.[4] Dengan menyandingkan prasasti-prasasti batu Melayu Kuno yang ditemukan di Sumatra (seperti Kedukan Bukit dan Talang Tuo) dengan Prasasti Ligor berbahasa Sanskerta dari Semenanjung Thai-Melayu, serta melakukan referensi silang dengan fonetik istilah Tiongkok *Shilifoshi* dan istilah Arab *Zābaj*, Cœdès secara definitif membuktikan bahwa semua sumber kuno yang tampaknya tidak berhubungan ini sebenarnya mendeskripsikan entitas politik yang sama: kemaharajaan

talasokrasi Śrīvijaya.[4]
Lebih jauh lagi, Cœdès memberikan postulat bahwa jantung politik dan ekonomi dari kemaharajaan ini terletak di Palembang, di bagian tenggara pulau Sumatra.[4] Dari simpul strategis di tepi Sungai Musi ini, Śrīvijaya mengendalikan rute maritim yang sangat krusial di Selat Malaka dan Selat Sunda, memegang hegemoni mutlak atas rute sutra maritim yang menghubungkan perairan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan.[23]

Geografi Epigrafi: Bukti Tekstual Śrīvijaya

Perdebatan akademis yang intens antara Cœdès dan para sarjana Belanda bergantung pada sekumpulan bukti epigrafis yang sangat spesifik. Prasasti-prasasti ini, yang dibaca dan dikonteksualisasikan oleh Cœdès, merupakan dasar dari konstruksi paradigma Śrīvijaya. Tabel berikut menguraikan prasasti-prasasti primer yang memvalidasi eksistensi kemaharajaan tersebut:

Nama Prasasti	**Lokasi Penemuan**	**Bahasa**	**Tahun (Masehi)**	**Signifikansi Historiografis & Analisis**
Kedukan Bukit	Palembang, Sumatra	Melayu Kuno	683	Menandai "hari jadi" politik Śrīvijaya. Mencatat perjalanan suci (*siddhayatra*) raja dengan armada militer berjumlah 20.000 tentara, menetapkan kekuatan maritim awal negara tersebut. [18]
Talang Tuo	Palembang, Sumatra	Melayu Kuno	684	Merinci dedikasi sebuah taman suci (Śrīksetra) oleh raja Śrīvijaya, mencerminkan ideologi kebajikan Buddha Mahayana dan kecanggihan ekologis dari penguasa awal. [24]
Kota Kapur	Pulau Bangka	Melayu Kuno	686	Prasasti pertama

				yang menguraikan kata "Śrīvijaya" (oleh H. Kern, 1913). Berisi kutukan atau sumpah ancaman (*imprecation*) terhadap wilayah vasal yang memberontak, membuktikan perluasan hegemoni militer ke luar Palembang.[4]
Ligor (Sisi A)	Nakhon Si Thammarat, Semenanjung Thai	Sanskerta	775	Membuktikan ekspansi militer dan budaya Śrīvijaya ke arah utara menuju Semenanjung Malaya; menjadi bukti krusial dalam perdebatan lokasi ibu kota (Sumatra vs. Semenanjung).[6]
Ligor (Sisi B)	Nakhon Si Thammarat, Semenanjung Thai	Sanskerta	Akhir Abad ke-8	Menyebutkan seorang raja agung dari dinasti *Śailendra*, yang memicu perdebatan panjang mengenai hubungan politik antara Śrīvijaya di Sumatra dan monumen-monumen raksasa di Jawa.[6]

Perdebatan Lokasi: Sumatra Versus Semenanjung Malaya

Penemuan dan publikasi Cœdès pada tahun 1918 tidak langsung diterima sebagai kebenaran mutlak; sebaliknya, hal ini segera memicu perdebatan akademis yang meluas mengenai lokasi persis ibu kota Śrīvijaya, sebuah perselisihan yang menyedot perhatian para sarjana Prancis, Belanda, dan India.[4] Sementara Cœdès tetap pada keyakinan teguhnya bahwa jantung politik Śrīvijaya terletak di Palembang, sebaran geografis prasasti Śrīvijaya yang sangat luas membuat sarjana lain mengusulkan pusat kekuasaan alternatif.[4]

Sarjana seperti H.G. Quaritch Wales dan R.C. Majumdar dari India mengajukan hipotesis bahwa ibu kota Śrīvijaya mungkin sebenarnya terletak di Semenanjung Malaya, khususnya di Chaiya di Teluk Bandon, atau di Nakhon Si Thammarat (Ligor).[6] Penemuan Prasasti Ligor, yang bertanggal 775 M, yang memperingati pendirian tempat suci Buddha Mahayana oleh Raja Śrīvijaya, memberikan bukti kuat tentang penetrasi kekaisaran tersebut ke semenanjung.[6] Sarjana Belanda lainnya, J.L. Moens, merumuskan teori kompleks yang menyatakan bahwa ibu kota kerajaan tersebut terus berpindah antara Sumatra dan Semenanjung (seperti Kedah) sebagai respons terhadap perubahan rute perdagangan maritim dan tekanan militer eksternal.[24]

Cœdès secara sistematis membongkar hipotesis semenanjung tersebut dalam makalah-makalah berikutnya, seperti artikelnya pada tahun 1936 di *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, yang dengan kukuh mempertahankan keunggulan proksimitas geografis dan bukti toponimi dari simpul Palembang.[24] Beberapa dekade kemudian, kemajuan dalam penggalian arkeologi Sumatra pada akhir abad ke-20—terutama di sepanjang cekungan Sungai Musi dan di Bukit Seguntang—akhirnya membuktikan bahwa Cœdès benar, mengkonfirmasi konsentrasi besar budaya material abad ke-7 hingga ke-11 di Palembang.[4]

Respons Akademik Hindia Belanda: Krom, Vogel, dan Integrasi Jawa

Publikasi "Le royaume de Çrīvijaya" mengirimkan gelombang kejutan melintasi koridor-koridor akademis di Belanda dan wilayah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda telah membentuk aparatur arkeologi yang sangat tangguh di tanah jajahan mereka, yaitu *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala), yang dipimpin berturut-turut oleh N.J. Krom (1910–1916), F.D.K. Bosch (1916–1936), dan W.F. Stutterheim (1936–1942).[26] Sebelum tahun 1918, historiografi Belanda sangat "Jawa-sentris" (Javano-centric), dengan fokus utama penelitian dan restorasi ditujukan pada reruntuhan monumental Hindu-Buddha di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Borobudur, Mendut, dan Prambanan.[5]

N.J. Krom dan "Periode Sumatra" dalam Sejarah Jawa

Reaksi Belanda yang paling signifikan dan berdampak panjang datang dari Nicolaas Johannes Krom. Hampir setahun setelah artikel Cœdès diterbitkan, tepatnya pada bulan Desember 1919, Krom menggunakan temuan Cœdès sebagai landasan teoretis untuk pidato pengukuhannya sebagai profesor arkeologi Hindia di Universitas Leiden.[5] Dalam pidato yang berjudul "De Sumatraansche periode der Javaansche Geschiedenis" (Periode Sumatra dalam Sejarah Jawa), Krom merangkul sepenuhnya "penemuan" Cœdès dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka sejarah kolonial Belanda.[4]

Krom menyadari bahwa kemunculan entitas Śrīvijaya memecahkan misteri kronologis dan politik yang mendalam dalam sejarah arsitektur Jawa. Referensi Prasasti Ligor (Sisi B) tentang dinasti Śailendra—dinasti yang sama yang bertanggung jawab atas pembangunan mandala batu raksasa Borobudur di Jawa Tengah—menunjukkan adanya hubungan intrinsik antara kekuatan maritim Sumatra dan monumen keagamaan Jawa.[5] Krom berhipotesis bahwa selama akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9, pulau Jawa mengalami "periode Sumatra" di mana raja-raja Śailendra dari Śrīvijaya memperluas kekuasaan atau pengaruh budaya mereka atas Jawa Tengah, yang memicu zaman keemasan perkembangan arsitektur Buddha Mahayana di pulau tersebut.[5]

Sintesis antara terjemahan epigrafi dari Siam-Prancis (Cœdès) dan interpretasi arkeologi arsitektur dari Belanda (Krom) ini merupakan contoh sempurna dari jaringan pengetahuan trans-imperial pada masa itu. Para ahli Sanskerta dan arkeolog terkemuka seperti J.Ph. Vogel di Universitas Leiden dengan cepat mengakui bahwa makalah Cœdès memiliki "kepentingan yang luar biasa bagi sejarah kuno Kepulauan Hindia" (Nusantara), secara definitif melembagakan studi mengenai Śrīvijaya ke dalam kurikulum dan aparatur pengetahuan kolonial Belanda.[5] Krom kemudian mengabadikan narasi sejarah ini dalam buku teks standarnya pada tahun 1931, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis* (Sejarah Hindu-Jawa), yang sangat bergantung pada fondasi tekstual yang telah diletakkan oleh Cœdès.[24]

Tabel berikut menunjukkan dinamika intelektual di dalam Dinas Purbakala Belanda yang merespons temuan Cœdès:

Direktur Oudheidkundige Dienst	**Masa Jabatan**	**Kontribusi Intelektual terhadap Narasi Śrīvijaya/Jawa**
N.J. Krom	1910–1916	Mempopulerkan konsep "Periode Sumatra" di Jawa; menyatukan penguasa Śrīvijaya dan dinasti Śailendra Jawa sebagai satu entitas hegemonik.[5]
F.D.K. Bosch	1916–1936	Melanjutkan pekerjaan

		pelestarian artefak Jawa di bawah bayang-bayang perdebatan letak ibu kota Śrīvijaya.[26]
W.F. Stutterheim	1936–1942	Mengusulkan interpretasi alternatif mengenai patung candi Jawa sebagai perwujudan raja yang telah meninggal, serta meneliti temuan epigrafi dan artefak langsung di Palembang (1935), memperdalam komplikasi politis antara Jawa dan Sumatra.[24]

Komplikasi Dinasti: Śailendra dan Śrīvijaya

Namun, korespondensi dan harmoni teoretis antara Cœdès dan Krom tidak terlepas dari friksi akademis yang substansial. Sementara mereka sepakat tentang eksistensi dan pentingnya Śrīvijaya, mekanisme geopolitik yang tepat dari dinasti Śailendra tetap sangat diperdebatkan.[6] Sejarawan awal, termasuk Cœdès dan Krom, cenderung memandang Śailendra sebagai dinasti murni dari Sumatra yang telah menaklukkan dan memerintah sebagian Jawa.[6] Mereka bahkan menyamakan penguasa Samaragrawira dengan penguasa Jawa Samaratungga sebagai tokoh yang sama.[27]

Seiring berjalannya waktu dan penggalian lebih lanjut oleh *Oudheidkundige Dienst*, perdebatan ini berevolusi. Sejarawan seperti Slamet Muljana kemudian berpendapat bahwa Śailendra awalnya adalah dinasti yang mengakar di Jawa, yang pada akhirnya menduduki takhta Śrīvijaya di Sumatra melalui diplomasi pernikahan politik (misalnya, pernikahan Dewi Tara, putri raja Śrīvijaya Dharmasetu, dengan pangeran Śailendra Samaratungga).[27] Pergeseran ini menunjukkan bagaimana penemuan Cœdès bersifat sangat dinamis dan terus memicu reevaluasi bukti-bukti arkeologis di seluruh Nusantara selama beberapa dekade kemudian.

Konvergensi Diplomatik dan Akademik: Misi ke Batavia (1928)

Interaksi tekstual dan teoretis yang konstan antara Cœdès dan institusi akademik Belanda memuncak dalam sebuah konvergensi fisik yang sangat signifikan pada tahun 1928. Peristiwa ini menyoroti hubungan institusional mendalam yang menembus batas-batas lingkup pengaruh

kolonial Prancis, kekuatan Belanda, dan kedaulatan Siam.

Perayaan 150 Tahun *Bataviaasch Genootschap*

Pada April 1928, George Cœdès melakukan perjalanan resmi ke Batavia (kini Jakarta) untuk menghadiri perayaan hari jadi ke-150 *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Batavia).[3] Didirikan pada tahun 1778 oleh seorang pejabat muda VOC bernama J.C.M. Radermacher, perkumpulan tersebut merupakan institusi ilmiah tertua dan paling prestisius di Asia Tenggara, yang berfungsi sebagai mesin intelektual utama untuk menganalisis aspek-aspek budaya, sejarah, dan lingkungan alam dari Hindia Belanda.[31]

Kehadiran Cœdès pada peringatan yubileum tersebut sangat simbolis dan membawa implikasi diplomatik. Ia menghadiri perayaan itu dalam kapasitas ganda: sebagai Sekretaris Jenderal Institut Kerajaan Siam (Royal Institute of Bangkok) dan sebagai Presiden The Siam Society.[3] Kehadirannya ini merupakan jembatan diplomatik resmi sekaligus simpul keilmuan antara Kerajaan Siam yang merdeka dan negara kolonial Hindia Belanda. Selama upacara berlangsung, Cœdès menerima penghormatan tertinggi dari para akademisi Belanda atas karya monumentalnya yang menyingkap sejarah Śrīvijaya, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai cendekiawan terdepan yang tidak tertandingi (*unchallenged dean*) dalam keilmuan klasik Asia Tenggara.[3]

Transfer Teknologi Arsitektur: Pengamatan Teknik Anastilosis

Meskipun penghormatan diplomatik sangatlah penting, pengetahuan teknis dan metodologis yang diperoleh Cœdès selama kunjungan tahun 1928 ini membawa dampak fisik jangka panjang yang mengubah lanskap arkeologi di seluruh Asia Tenggara. Sebagai bagian dari agenda perayaan, Cœdès dibawa dalam tur resmi untuk mengunjungi situs-situs arkeologi utama di Jawa, yang paling menonjol adalah candi stupa Buddha Mahayana raksasa Borobudur dan kompleks percandian Hindu abad ke-9 Prambanan.[3]

Di situs-situs bersejarah inilah Cœdès mengamati metode pelestarian canggih yang sedang digunakan oleh *Oudheidkundige Dienst* Belanda. Secara spesifik, ia diperkenalkan pada teknik **anastilosis** (*anastylosis*) oleh arkeolog dan insinyur Belanda seperti Pieter Vincent van Stein Callenfels dan Theo van Erp.[10] Anastilosis merupakan metodologi pemugaran arkeologis yang sangat teliti dan presisi, di mana bangunan atau monumen yang runtuh direkonstruksi kembali dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur aslinya semaksimal mungkin. Alih-alih membangun ulang struktur candi menggunakan bahan-bahan modern atau menebak-nebak bentuk aslinya (yang sering kali destruktif), para arkeolog menggali puing-puing di sekitar situs dengan hati-hati, membuat katalog untuk setiap batu yang jatuh, memetakan logika struktural aslinya, dan merakit ulang monumen tersebut lapis demi lapis layaknya teka-teki raksasa (*jigsaw puzzle*). Material baru hanya disisipkan jika hal itu benar-benar dibutuhkan secara esensial demi stabilitas struktural, dan material sisipan tersebut harus dibedakan secara visual dari batu aslinya.

Cœdès sangat terkesan dengan ketelitian ilmiah serta keaslian estetika yang dihasilkan oleh pengerjaan anastilosis di Prambanan. Pendekatan restoratif dari Belanda ini sangat kontras dengan metode intervensi arsitektur masa lalu yang lebih ceroboh, merusak, atau terlalu banyak melakukan rekonstruksi imajinatif. Implikasi dari pengamatan Cœdès ini langsung membuahkan hasil. Ketika ia meninggalkan posisinya di birokrasi Siam pada tahun 1929 untuk menerima tawaran menjadi Direktur EFEO di Hanoi (sebuah posisi yang akan ia pegang hingga tahun 1946), ia membawa serta paradigma restorasi metodologis Belanda ini kembali ke Indochina Prancis.[1]

Pada tahun 1930, bertindak atas wawasan yang ia peroleh di Batavia, Cœdès memerintahkan arsitek utama EFEO, Henri Marchal, untuk melakukan perjalanan studi ke Hindia Belanda guna mempelajari metode anastilosis secara mendalam dan terperinci.[10] Marchal kemudian membawa pulang teknik tersebut dan berhasil mengaplikasikannya dalam pemugaran candi Banteay Srei, dan pada akhirnya menjadi standar prosedur operasi untuk restorasi kompleks Angkor Wat yang lebih luas di Kamboja.[10] Dengan demikian, pertemuan akademis di Batavia pada tahun 1928 memfasilitasi transfer teknologi lintas imperium yang sangat monumental, yang secara harfiah menentukan bentuk fisik pelestarian kuil-kuil Khmer di Asia Tenggara selama beberapa dekade berikutnya.[3]

Mesin Kolonialisme: Ilmu Pengetahuan, Ekstraksi, dan Hubungan Korporasi

Untuk memahami secara utuh hakikat institusi akademik Belanda yang berinteraksi dengan Cœdès, merupakan suatu keharusan untuk menganalisis ekosistem kolonial yang lebih luas di Hindia Belanda. Institusi ilmiah seperti *Bataviaasch Genootschap* tidak beroperasi dalam ruang hampa akademis yang murni; lembaga-lembaga ini pada hakikatnya terjalin erat dengan imperatif ekonomi dan eksploitasi ekstraktif dari negara kolonial. Arkeologi dan pelestarian sejarah di Hindia Belanda sering kali didanai oleh, dan difasilitasi secara logistik melalui, jaringan mengerikan yang sama yang menguras kekayaan mineral dan agrikultur kepulauan tersebut.

Koneksi *Bataviaasch Genootschap* dan *Billiton Maatschappij*

Bataviaasch Genootschap adalah lembaga yang sejak awal pembentukannya sangat lekat dengan pemerintahan.[31] Semboyan perhimpunan tersebut, *Ten Nutte van Het Gemeen* (Untuk Kepentingan Umum Terbaik), secara implisit merujuk pada kepentingan kolonialis Belanda.[31] Dewan direksinya secara historis mencakup Gubernur Jenderal dan pejabat tinggi militer serta sipil VOC, dan pada masa-masa berikutnya, para tokoh kunci dari birokrasi kolonial.[31]

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terlihat adanya tumpang tindih yang sangat mencolok antara keanggotaan perhimpunan ilmiah (seperti dewan direktur *Bataviaasch*

Genootschap) dengan keanggotaan dewan direksi perusahaan-perusahaan raksasa ekstraksi sumber daya kolonial. Contoh paling menonjol dari sinergi ilmu pengetahuan dan kapitalisme ini adalah koneksi historis dengan *N.V. Billiton Maatschappij* (Perusahaan Tambang Billiton/Belitung).[33] Dimulai sebagai perusahaan swasta pada tahun 1852 (dan kemudian berubah menjadi perusahaan patungan bersama pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892), perusahaan ini didirikan untuk mengeksploitasi cadangan bijih timah yang masif di pulau Belitung.[33]

Asal mula pembentukan perusahaan tambang ini pada kenyataannya lahir dari rahim *Bataviaasch Genootschap* itu sendiri. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sebuah sampel bongkahan bijih timah yang sederhana, yang disimpan di dalam koleksi geologi museum *Bataviaasch Genootschap* di Batavia pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, merupakan katalis awal yang mengonfirmasi keberadaan endapan timah yang kaya di Pulau Belitung (mirip dengan Pulau Bangka di sebelahnya).[34] Penemuan dalam koleksi museum ini secara langsung memicu eksplorasi komersial pada pertengahan abad ke-19 yang dipimpin oleh J.F. Loudon dan Pangeran Hendrik.[34]

Lebih jauh lagi, pada tahun 1920-an, para agen umum dan direktur utama *Billiton Maatschappij* (seperti Van de Stadt) sering kali menjadi anggota dewan atau donatur institusi kebudayaan dan ilmiah di Batavia.[36] Kekayaan astronomis yang dihasilkan oleh entitas-entitas korporat pertambangan ini memberikan fondasi finansial tak langsung bagi negara kolonial untuk mendanai instansi seperti *Oudheidkundige Dienst*, membiayai restorasi mahal candi-candi raksasa seperti Borobudur, dan membiayai penerbitan jurnal-jurnal mewah yang dibaca oleh sarjana seperti Cœdès.[38]

Transformasi Sosial-Ekonomi dan Tragedi Pulau Timah

Sementara arkeolog kolonial seperti N.J. Krom dan W.F. Stutterheim secara perlahan menggali kejayaan masa lalu wangsa Śailendra dan menterjemahkan epigrafi yang disodorkan Cœdès, sayap ekstraktif ekonomi negara kolonial sedang secara radikal mengubah realitas demografis, sosial, dan ekonomi pulau-pulau di Nusantara—termasuk pulau-pulau yang mengelilingi pusat jantung sejarah Śrīvijaya di Sumatra Selatan.

Operasi penambangan timah dengan cepat berekspansi melebihi Belitung. Pada tahun 1890, perusahaan Belanda swasta *Singkep Tin Maatschappij* mendapatkan konsesi luas untuk mengeruk deposit timah di Pulau Singkep yang terletak di Kepulauan Riau.[39] Menjelang tahun 1933/1934, operasi penambangan intensif ini kemudian diambil alih oleh konglomerat besar *Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton* melalui anak perusahaannya yang bernama *N.V. Singkep TIN Exploitatie Maatschappij* (SITEM).[40]

Dominasi korporat ini membawa dampak destruktif sekaligus transformatif yang sangat total terhadap struktur ekonomi dan ekologi lokal. Singkep secara praktis diubah menjadi "pulau perusahaan" (*company island*). Sepanjang periode aktifnya (terutama dari era akhir kolonial hingga industri ini pada akhirnya runtuh sepenuhnya pada tahun 1992), pertambangan timah menyumbang angka yang mencengangkan, yakni antara 65% hingga 90% dari total ekonomi

lokal pulau tersebut.[41] Industri ekstraktif ini menjadi satu-satunya sumber penghidupan, secara langsung menyediakan 2.452 dari 8.716 total lapangan pekerjaan, dan menghidupi hampir 75% dari seluruh populasi.[41] Konsorsium pertambangan ini mengendalikan hampir seluruh infrastruktur vital pulau, mulai dari pembangkit listrik terpusat, instalasi air bersih komersial, rumah sakit, hingga bandar udara.[41] Mereka bahkan mendirikan sekolah dasar eksklusif yang fasilitasnya jauh lebih "mewah" dibandingkan sekolah negeri, namun sangat diskriminatif karena diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak pegawai tambang perusahaan.[41]
Tabel berikut merangkum dampak sosial-ekonomi dari kebijakan penambangan kolonial di pulau-pulau Sumatra:

Aspek Dampak	**Detail Eksploitasi Kolonial di Pulau Timah (Singkep/Belitung)**
Demografis	Perusahaan merekayasa gelombang migrasi massal para pekerja kontrak (kuli) dari etnis Tionghoa untuk melakukan kerja fisik ekstrem di tambang darat terbuka (*kolong*), terowongan bawah tanah (*seroengoengs*), maupun kapal keruk lepas pantai. Pada tahun 1920, populasi imigran ini di Belitung mencapai hampir 29.000 jiwa (hampir semuanya laki-laki), mencakup lebih dari 40% dari total populasi pulau.[33]
Ketenagakerjaan & Hak Asasi	Para buruh penambang menghadapi kondisi kerja yang sangat brutal, menderita akibat penyakit di daerah tropis, dan dieksploitasi melalui sistem kerja paksa serta jeratan hutang (sistem panjar/uang muka yang mengikat pekerja tanpa kebebasan menolak).[33]
Degradasi Lingkungan	Terjadi kerusakan ekologis yang masif, deforestasi, serta kemunculan kawah-kawah tambang beracun yang ditinggalkan (*kolong*) tanpa adanya upaya remediasi atau reklamasi lahan yang berkelanjutan, menciptakan lanskap yang cacat secara permanen.[41]
Kehancuran Ekonomi Jangka Panjang	Tata kelola sumber daya yang buruk oleh entitas kolonial memicu kutukan sumber daya (*resource curse*). Tidak adanya diversifikasi ekonomi menyebabkan kehancuran ekonomi total, pengangguran struktural massal, dan runtuhnya infrastruktur segera setelah cadangan timah pulau tersebut menipis di akhir abad ke-20.[41]

Paradoks Kebijakan: Penumpasan Kesultanan Riau-Lingga (1911)

Ekspansi administrasi dan penetrasi kapitalisme Belanda yang sangat agresif ke pulau-pulau kaya timah di lepas pantai timur Sumatra menuntut dibongkarnya struktur kekuasaan tradisional pribumi yang masih memiliki otonomi. Kesultanan Riau-Lingga, sebuah kekuatan sejarah yang dulunya memiliki kedaulatan kuat atas pulau-pulau di sebelah selatan Selat Singapura, menemukan eksistensinya secara progresif dipinggirkan, dilemahkan, dan ditekan oleh kebijakan kolonial Belanda yang mendambakan kendali monopoli absolut.[43]

Ketegangan politik ini mencapai puncaknya yang tragis pada tahun 1911. Pemerintah Hindia Belanda, yang sangat berambisi untuk mengonsolidasikan yurisdiksi dan monopoli ekonomi di atas wilayah tersebut tanpa gangguan dari birokrasi aristokrat pribumi, merekayasa sebuah tuduhan palsu (*trumped-up charge*) terhadap Sultan Abdulrahman Muazzam Shah II, sultan terakhir dari Kesultanan Riau-Lingga.[44] Ketika militer Belanda berusaha melakukan penangkapan, sang Sultan terpaksa melarikan diri mencari suaka politik ke Singapura di tengah hujan badai yang lebat.[44] Dalam sebuah tindakan perlawanan terakhirnya sebelum kekuasaannya runtuh, Sultan yang diturunkan tersebut secara dramatis memerintahkan agar seluruh istana kerajaan beserta perlengkapannya di pulau Lingga dan Penyengat dibakar habis rata dengan tanah, daripada jatuh ke tangan pasukan Belanda.[44]

Peristiwa tahun 1911 ini menyingkap sebuah kontradiksi dan hipokrisi yang sangat mendalam dalam esensi kebijakan kolonial Belanda. Pada saat yang persis sama ketika institusi kebudayaan seperti *Bataviaasch Genootschap* dan Dinas Purbakala sedang mengucurkan dana luar biasa besar untuk memugarkan candi-candi Hindu-Buddha kuno di Jawa menggunakan metode anastilosis, serta bekerja sama secara elegan dengan sarjana internasional seperti George Cœdès untuk mengatalogisasi narasi kejayaan imperium kuno Śrīvijaya, mesin kolonial itu secara aktif menghancurkan warisan sejarah Islam yang masih hidup dan nyata—seperti menumpas Kesultanan Melayu—hanya demi menjamin monopoli ekonomi tanpa batas bagi perusahaan swasta ekstraktif seperti *Billiton Maatschappij*. Masa lalu yang mati dirawat dengan dedikasi ilmiah; institusi pribumi yang masih hidup dimusnahkan.

Legasi Historiografis: Paradigma India Raya dan Nasionalisme Regional

Keluaran ilmiah yang sangat masif yang dihasilkan oleh jaringan George Cœdès, N.J. Krom, J.Ph. Vogel, dan rekan-rekan sezaman mereka tidak terbentuk di dalam ruang hampa ideologis. Kerangka dasar pemikiran yang menuntun penafsiran mereka tentang kebangkitan Śrīvijaya, monumen di Siam, maupun kemegahan seni kuno di Jawa sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh konsep *Greater India* ("India Raya", *L'Inde Extérieure*, atau *India Extra Gangem*).[45]

Konsep ini pada awalnya diciptakan dan dipromosikan secara luas oleh kaum Orientalis

Eropa—dan kemudian hari diadopsi secara antusias oleh komunitas "Greater India Society" yang didirikan oleh sejarawan-sejarawan asal Bengali pada tahun 1926.[47] Paradigma ini mempostulatkan bahwa kemunculan budaya-budaya yang sangat canggih, arsitektur yang serba monumental, dan sistem kenegaraan epik (*statecraft*) di Asia Tenggara adalah semata-mata hasil langsung dari proses kolonisasi dan penyebaran misi "pemberadaban" (*civilizing mission*) yang dilakukan oleh India kuno.[47] Wilayah Asia Tenggara (atau tanah *Suvarṇadvīpa* / Pulau Emas) sering kali dipandang secara difusionis sempit: India bertindak sebagai pusat kebudayaan aktif dan dominan, sementara Asia Tenggara merupakan periferal atau pinggiran yang pasif yang hanya menerima cahaya kebudayaan tersebut.[47]

Meskipun George Cœdès secara tidak langsung mempopulerkan kerangka acuan konseptual ini melalui adikarya sintesisnya, *The Indianized States of Southeast Asia* (awalnya diterbitkan dalam bahasa Prancis sebagai *Les états hindouisés d'Indochine et d'Indonésie* pada tahun 1948, namun esensinya dibangun di atas hasil riset puluhan tahun sebelumnya sejak di Siam), pendekatan analitis yang digunakan oleh Cœdès maupun sarjana Belanda sesungguhnya memiliki nuansa yang lebih mendalam dan rumit.[2] Mereka tidak memandang "Indianisasi" sekadar sebagai invasi militer yang kasar, melainkan sebagai proses asimilasi kultural, sinkretisme religius, serta perkawinan linguistik yang rumit, yang dimediasi oleh jaringan merkantil (perdagangan pesisir) dan kaum elit intelektual Brahmana.[24] N.J. Krom, misalnya, berargumen bahwa penanaman unsur-unsur dari India ke Nusantara pasti dilakukan tidak hanya oleh pelaut atau saudagar di permukiman pantai semata, tetapi ditarik lebih jauh ke pedalaman oleh elit-elit budayawan kasta tinggi yang kemudian melebur bersama peradaban aristokratik pribumi Asia Tenggara.[24]

Terlepas dari perbaikan teoretis ini, paradigma "India Raya" tetap menyimpan sindiran implisit terhadap kolonialisme modern.[48] Dengan melukiskan secara naratif bahwa masa keemasan kuno Asia Tenggara hanya mampu diraih melalui proses adopsi kultur asing yang diklaim "lebih superior" (yakni kebudayaan Indik), maka narasi purbakala ini secara halus dan tidak sadar berfungsi sebagai cerminan filosofis (serta legitimasi historis) bagi "misi peradaban" (misalnya *Mission civilisatrice*) yang tengah dilancarkan oleh imperium Prancis di Semenanjung Indochina dan "Kebijakan Etis" imperium Belanda di kepulauan Hindia Timur.[48] Pendekatan Barat ini, yang sangat terpaku pada istana-istana kerajaan klasik dan peninggalan purbakala monumental Hindu-Buddha, pada akhirnya cenderung meminggirkan (memarginalkan) masa prasejarah pribumi murni serta kejayaan periode Islam yang muncul setelahnya, menempatkan Asia Tenggara sekadar sebagai "kultur peniru" yang kemudian diindikasikan mengalami kemerosotan budaya dan kebobrokan institusional pada abad-abad selanjutnya—sehingga "secara logis" membutuhkan intervensi paternalistik, patronase, dan kontrol tata kelola Eropa modern untuk memulihkan dan merawat sisa-sisa kedigdayaannya yang telah runtuh.[48]

Dampak Berantai yang Tak Terduga: Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Salah satu dampak orde-kedua (dan orde-ketiga) yang paling krusial—sekaligus paling ironis—dari dialog persuratan dan kolaborasi arsitektural antara sarjana birokrasi seperti Cœdès dan Krom adalah pengaruhnya yang tak disengaja dalam memantik gerakan anti-kolonialisme. Para arkeolog Belanda dan Prancis mengonstruksi sejarah kerajaan masa silam Asia Tenggara murni atas nama pengejaran ilmu pengetahuan positif (positivisme ilmiah) serta sekadar untuk memahami komposisi genetik dari masyarakat teritori yang sekarang dikuasai dan diekstraksi oleh mereka. Namun, bagi kaum intelektual muda di Hindia Belanda, kebangkitan narasi Śrīvijaya dan Majapahit menyuguhkan sebuah preseden kesejarahan yang luar biasa berharga untuk melegitimasi gagasan radikal bahwa kawasan Nusantara pada mulanya memang merupakan satu kesatuan bangsa yang merdeka dan mandiri.[18]

Sebelum tahun 1918, memori historis lokal di Sumatra didominasi secara mutlak oleh ingatan komunal yang bersifat "Jawa-sentris". Kisah-kisah tradisi lisan di wilayah sekitar Sungai Musi (Palembang) secara eksklusif berakar dari mitos-mitos pasca-Majapahit dan sejarah kesultanan Islam, tanpa ada satupun jejak ingatan lokal terkait entitas peradaban besar kuno yang berbasis lokal bernama "Śrīvijaya"—sebuah nama yang pada dasarnya terhapus total dari ingatan para penutur asli bahasa tersebut.[18] Baru ketika temuan Cœdès serta teori pendukungnya yang disebarluaskan oleh Krom meresap turun dari mimbar akademis menuju publik terpelajar pribumi, tokoh-tokoh utama penggerak sayap nasionalis Indonesia, khususnya dari kalangan pelajar Sumatra seperti Mohammad Yamin, merengkuh dengan penuh antusias narasi tersebut.[18]

Memasuki dekade 1920-an, terutama dalam momentum revolusioner *Sumpah Pemuda* (1928)—tahun yang sama ketika Cœdès sedang menikmati penghormatan di Batavia—Yamin, Soekarno, dan kelompok *Jong Sumatranen Bond* dengan piawai memanfaatkan data sejarah yang dikonfirmasi oleh Cœdès.[18] Mereka menggunakan realitas epigrafis dari kekaisaran thalassokratik Śrīvijaya kuno—yang wilayah kedaulatannya melingkupi Nusantara modern sekaligus semenanjung wilayah Malaya dan sebagian dari daratan kerajaan Siam modern—sebagai bukti sejarah absolut. Pembuktian masa lampau ini menegaskan bahwa kemunculan gagasan Indonesia modern yang besar dan bersatu bukanlah sekadar mitos atau produk konstruksi artifisial pemerintah kolonial Belanda, melainkan sebuah realitas kedaulatan asli wilayah Asia Tenggara yang hanya tinggal menunggu waktu untuk dibangkitkan dan direstorasi kembali dari cengkeraman imperialisme Eropa.[18]

Adalah sebuah testimoni tersendiri betapa kokohnya landasan tekstual, presisi metodologis, dan standar transliterasi dari Cœdès (seperti transliterasi sistem tulisan Thai) bahwa sejarawan generasi berikutnya—terutama O.W. Wolters dan sarjana pascakolonial—terus menggunakan teks epigrafis dan transkrip naskah utama yang diselamatkan serta diuraikan oleh Cœdès pada awal abad ke-20 untuk mendekonstruksi bias orientalis "India Raya" di kemudian hari.[2] Pengetahuan yang dikuratori ini memicu peralihan titik berat pemahaman pada konsep "kegeniusan lokal" (*local genius*) masyarakat Asia Tenggara—yaitu pemahaman mendalam tentang kecanggihan teknologi kemaritiman asli, dinamika kekuatan konsep *mandala* tradisional yang lentur, dan arsitektur politik yang sepenuhnya pribumi—namun semua ini dibangun kukuh di atas pilar landasan epigrafis yang dicetak oleh Cœdès serta divalidasi oleh pakar arkeologi kolonial Hindia Belanda dalam periode 1910–1930.[30]

Kesimpulan

Periode antara 1910 dan 1930 mencatatkan dirinya sebagai zaman pembentukan, kristalisasi keilmuan, serta peletakan batu penjuru yang paling fundamental dalam historiografi sejarah purbakala Asia Tenggara. Titik temu triangulasi yang difasilitasi oleh kecemerlangan intelektual filologis George Cœdès, yang menjembatani patronase pencerahan sistem birokrasi Kerajaan Siam dengan sarjana kolonial Belanda dari Universitas Leiden dan Batavia, telah secara kolektif membidani suatu arsitektur basis ilmu pengetahuan yang komprehensif yang hingga saat ini tetap menjadi referensi vital bagi seluruh penelitian keilmuan Asia Tenggara modern.

Kapasitas ganda Cœdès yang berada di garis depan *Sekretaris Luar Negeri Institut Kerajaan Siam* serta pengarah akademik Prancis di *École française d'Extrême-Orient* memberikan dirinya otonomi serta instrumen diplomatik sebagai duta epistemologi purbakala di wilayah tersebut.[8] Momen historis saat artikelnya tahun 1918 berhasil merekonstruksi keberadaan dan peta kekuasaan kemaharajaan maritim Sriwijaya secara sekejap menggeser episentrum geografis pemahaman masa lalu Asia Tenggara.[4] Identifikasinya yang presisi menyajikan argumen tanpa celah bahwa sebelum bangsa Eropa (baik Belanda, Portugis, Inggris, maupun Prancis) meletakkan dominasi navigasinya di Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan pada abad ke-16, jaringan niaga global yang amat kompleks dan sistematis telah berjaya selama nyaris satu milenium, dan dipandu oleh sebuah pusat komando kekuasaan adat di kepulauan Melayu.[4] Temuan yang membongkar mitos sejarah ini pada gilirannya memaksa barisan ahli sejarawan kolonial Hindia Belanda—dikepalai oleh N.J. Krom—untuk meramu dan merancang kembali kerangka sejarah arsitektur Jawa secara fundamental, memadukan monumentalitas agung Candi Borobudur sebagai sebuah entitas yang secara kronologis terkait erat dengan patron kekuatan lautan di Palembang, Sumatra.[5]

Lawatan keilmuan ke peringatan *Bataviaasch Genootschap* di Batavia pada bulan April 1928 tak pelak menyajikan sebuah manifestasi fisik yang paling jelas mengenai watak kolaborasi pragmatis dari jaringan akademik para raksasa historiografi zaman penjajahan ini.[3] Kemampuannya untuk membedah dan menyerap kemajuan dalam konservasi batu metodologis dari Belanda (seperti teknik arsitektur rekayasa *anastilosis*) yang kemudian dibawa serta disebarluaskan pada pemugaran kompleks kuil Khmer purba di Kamboja dan Indochina membuktikan bahwa penemuan-penemuan intelektual dari meja baca perpustakaan di Jawa telah sukses memahat pelestarian situs warisan sejarah batu paling agung secara praktis di berbagai pelosok daratan Asia Tenggara.[3]

Di balik masa keemasan penemuan filologis dan keberhasilan pemugaran yang megah, era ini pada dasarnya tersandera oleh realitas paradoks ekstraksi penjajahan itu sendiri. Aparatur dan mekanisme kolonialisasi Belanda yang sama yang membiayai penterjemahan prasasti sastra Sanskerta yang rumit serta merestorasi kembali candi Buddha terbesar di dunia juga berperan krusial dalam mensponsori kejatuhan struktur sosial-ekonomi penduduk asli secara eksploitatif, lewat operasi entitas bisnis multinasional semacam korporasi *Billiton Maatschappij*.[33] Usaha

penambangan pengerukan bijih timah secara agresif, brutal, dan tak terkendali di Singkep maupun Belitung yang dijalankan oleh angkatan kerja migran paksa (kuli) dari Tiongkok, bersanding dengan pemusnahan kekuatan dan pembakaran instrumen adat kebudayaan Nusantara modern dengan kudeta dan pengasingan sepihak Kesultanan Islam Riau-Lingga, jelas mempertontonkan wajah ganda kolonialisme.[41] Struktur penjajahan memberikan porsi pendanaan tanpa batas untuk merawat arsitektur batu dari seribu tahun lampau asalkan masa lalu itu secara politis dianggap "telah mati", namun secara sengaja mengeksploitasi sumber daya pribuminya pada masa kini serta menyapu habis dan mencerai-beraikan institusi kesultanan yang dianggap membahayakan monopoli eksploitasi mereka pada saat yang sama.[41]

Pada akhirnya, warisan historiografi dari Cœdès yang filologis, dinas purbakala kepulauan Belanda yang sistematis, dan pembaruan sejarah dinasti Siam jauh mengungguli rentang umur dan kepentingan empirium-imperium yang pada mulanya menyokong dan mendanai segala ekspedisi ilmu tersebut. Pola kerajaan konseptual dari mandala kuno Nusantara purba yang mereka angkat secara ilmiah dari batu bersurat yang tenggelam perlahan ke alam imajinasi publik, paling utama manifestasi dari nama suci Śrīvijaya, pada masa-masa revolusi belakangan direbut, diapropriasi kembali secara mandiri, dan dipergunakan seefektif mungkin sebagai justifikasi ideologis primordial oleh para cendekiawan bumiputra dan arsitek berdirinya republik untuk menggerakkan mesin kelahiran entitas merdeka berdaulat bagi negara-negara bangsa Asia Tenggara kontemporer yang kini kita saksikan.[18] Keseluruhan simpul peristiwa dan dialektika ini merupakan wujud bagaimana pemahaman tentang sebuah bangsa acap kali ditulis lewat korespondensi dan kolaborasi tripartit dari kekuasaan administratif terasing yang, dalam upaya menterjemahkan epigrafis kuno demi kemegahan ilmu di Eropa, tanpa disadari memicu sebuah embrio yang menamatkan kedigdayaan kolonial mereka sendiri dari atas bumi Asia.

Karya yang dikutip

1. Coedès Collection | National Library of Australia (NLA), diakses Maret 1, 2026, https://www.library.gov.au/research/guides-and-resources/guides-selected-collections/coedes-collection
2. George Cœdès - Wikipedia, diakses Maret 1, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/George_C%C5%93d%C3%A8s
3. George Cœdès à Batavia (1928) | The Journal of the Siam Society - ThaiJo, diakses Maret 1, 2026, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/290115
4. George Cœdès and Śrīvijaya | The Journal of the Siam Society - ThaiJo, diakses Maret 1, 2026, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/290114
5. The Prehistoric Cultures and Historic Past of South Sumatra on the Move (Chapter 5) - The Politics of Heritage in Indonesia - Cambridge University Press & Assessment, diakses Maret 1, 2026, https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-heritage-in-indonesia/prehistoric-cultures-and-historic-past-of-south-sumatra-on-the-move/476AB06DEFE51AC40CE580146B4DB976
6. Full text of "A History Of South East Asia" - Archive.org, diakses Maret 1, 2026,

https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.226410/2015.226410.A-History_djvu.txt
7. vice of Southeast Asian Studies Jean Baffie1 George Cœdès, diakses Maret 1, 2026, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/baffie-jss113-coedes-2025.pdf
8. 7 Royal Antiquarianism, European Orientalism and the Production of Archaeological Knowledge in Modern Siam - ResearchGate, diakses Maret 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/297784868_7_Royal_Antiquarianism_European_Orientalism_and_the_Production_of_Archaeological_Knowledge_in_Modern_Siam
9. In the Shadow of George Cœdès: Jean-Yves Claeys and the Mission to Siam (1929) - Angkor Database, diakses Maret 1, 2026, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/kourilsky-coedes-claeys-jss113-2025.pdf
10. The Art of Temple Restoration | PDF | Java - Scribd, diakses Maret 1, 2026, https://www.scribd.com/document/939790345/The-Art-of-Temple-Restoration
11. (PDF) George Cœdès à Batavia (1928) - ResearchGate, diakses Maret 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398692603_George_Coedes_a_Batavia_1928
12. About us | The Siam Society Under Royal Patronage, diakses Maret 1, 2026, https://thesiamsociety.org/about-us/
13. Professor George Coedes- An Appreciation - The Siam Society, diakses Maret 1, 2026, https://thesiamsociety.org/wp-content/uploads/1970/03/JSS_058_1j_ObituaryGCoedes.pdf
14. Catalog Record: Le Royaume de Çrivijaya | HathiTrust Digital Library, diakses Maret 1, 2026, https://catalog.hathitrust.org/Record/100161307
15. (PDF) Rescuing History from Srivijaya: The Fall of Angkor in the Ming Shilu (Part 1), diakses Maret 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/362343204_Rescuing_History_from_Srivijaya_The_Fall_of_Angkor_in_the_Ming_Shilu_Part_1
16. Materials Training Programme, D5.3 | RelReS, diakses Maret 1, 2026, https://reires.eu/wp-content/uploads/2019/10/RelReS-WP5-D5.3-Online-Materials-01.00.pdf
17. AT THE EDGE OF THE WORLD OF ISLAM: MARITIME SOUTHEAST ASIA IN THE EYES OF IBN BATTUTA, diakses Maret 1, 2026, https://www.etd.ceu.edu/2017/iankovskaia_aglaia.pdf
18. 'Welcome To Bumi Sriwijaya' or the Building of a Provincial Identity in Contemporary Indonesia - Asia Research Institute, NUS, diakses Maret 1, 2026, https://ari.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/wps08_102.pdf
19. Full Reviews | PDF - Scribd, diakses Maret 1, 2026, https://www.scribd.com/document/923826586/Full-Reviews
20. George Cœdès and Śrīvijaya: From Epigraphy to Archeology - ResearchGate, diakses Maret 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398692281_George_Coedes_and_Srivijaya_From_Epigraphy_to_Archeology

21. Thinking Through Srivijaya: Polycentric Networks in Traditional Southeast Asia - The International Studies Association, diakses Maret 1, 2026, http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/23e81aa1-2e38-42a5-86f5-d95c45e4d9ce.pdf
22. Here is an Example of the Problem with the Scholarship on “Srivijaya” - Le Minh Khai's SEAsian History Blog - archive, diakses Maret 1, 2026, https://leminhkhai.wordpress.com/2024/02/20/here-is-an-example-of-the-problem-with-the-scholarship-on-srivijaya/
23. CEU Department of Medieval Studies - Annual Vol. 24 2018, diakses Maret 1, 2026, https://ams.ceu.edu/2018.pdf
24. The Indianized states of Southeast Asia 9780824803681 - DOKUMEN.PUB, diakses Maret 1, 2026, https://dokumen.pub/the-indianized-states-of-southeast-asia-9780824803681.html
25. ogy George Cœdès and Śrīvijaya: From Epigraphy to Archeology - Angkor Database, diakses Maret 1, 2026, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/manguin-jp-srivijaya-coedes-jss113-2025.pdf
26. Historical Dictionary of Indonesia - PDF Free Download - epdf.pub, diakses Maret 1, 2026, https://epdf.pub/historical-dictionary-of-indonesia.html
27. Srivijay Mysterious | PDF | Strait Of Malacca | Southeast Asia - Scribd, diakses Maret 1, 2026, https://www.scribd.com/document/516518150/Srivijay-Mysterious
28. State Formation in First Millennium Southeast Asia: A Reappraisal - Social studies, diakses Maret 1, 2026, https://www.sociostudies.org/journal/articles/2091096/
29. Working Paper Series No. 52 Finding Java: Muslim nomenclature of insular Southeast Asia from Śrîvijaya to Snouck Hurgronje, diakses Maret 1, 2026, https://ari.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/wps05_052.pdf
30. “Notes” in “Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia” on Manifold, diakses Maret 1, 2026, https://manifold.uhpress.hawaii.edu/read/88f889f2-c76f-47bb-b7e1-4e570faec747/section/9c24f152-41ba-448b-8d5a-2c2edeb17576
31. Royal Batavian Society of Arts and Sciences - Wikipedia, diakses Maret 1, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Batavian_Society_of_Arts_and_Sciences
32. G. COEDES The Indianized States of Southeast Asia - Angkor Database, diakses Maret 1, 2026, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/The-Indianized-States-of-Southeast-Asia-by-George-Coedes-z-lib.org.pdf
33. INDONESIA: Bangka and Belitung in relation to surrounding islands BELITUNG 1988: Mining towns and Kecamatan - Cornell eCommons, diakses Maret 1, 2026, https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/9e82fa75-e3ff-4cf0-9219-6d86a117a966/content
34. Koloniale collecties, Nederlands aanzien - UvA-DARE (Digital Academic Repository), diakses Maret 1, 2026, https://pure.uva.nl/ws/files/1090540/105965_thesis.pdf
35. Pioneers and Milestones of Indonesian Geology (~1820-1960s), diakses Maret 1,

2026, https://vangorselslist.com/pdf/Pioneers_samples_vol_4_feb2022_van_gorsel.pdf
36. books on asia, diakses Maret 1, 2026, https://www.gertjanbestebreurtje.com/application/uploads/files/Catalogues/GJB_cat140.pdf
37. Biographies and Bibliographies of the Sinologists - Brill, diakses Maret 1, 2026, https://brill.com/display/book/9789004339637/B9789004339637_020.pdf
38. BRILL'S STUDIES IN INTELLECTUAL HISTORY, diakses Maret 1, 2026, https://brill.com/downloadpdf/display/title/2063.pdf
39. Exploring Singkep Island: A Colonial-Era Mining Hub - CSULFinance - Solusi Segala Kebutuhan Financial Anda, diakses Maret 1, 2026, https://www.csulfinance.com/en/exploring-singkep-island-a-colonial-era-mining-hub
40. Pertambangan Timah di Singkep oleh Singkep Tin Maatschappij (1889-1933), diakses Maret 1, 2026, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/109142
41. Socio-Economic Impacts and Sustainability of ... - University of Exeter, diakses Maret 1, 2026, https://ore.exeter.ac.uk/ndownloader/files/56805254
42. Tin mining in Indonesia - Wikipedia, diakses Maret 1, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Tin_mining_in_Indonesia
43. Memorial of Malaysia | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, diakses Maret 1, 2026, https://www.icj-cij.org/node/104750
44. Chapter 11 The Sultan of Lingga's Brass Band: Music, Politics and Memory in the Riau-Lingga Sultanate in - Brill, diakses Maret 1, 2026, https://brill.com/display/book/9789004686533/BP000021.xml
45. THE ROLE OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS and the New Global Order - UNAM, diakses Maret 1, 2026, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7049/29.pdf
46. 3 - Transimperial Knowledge Networks and the Research Paradigm of Greater India, diakses Maret 1, 2026, https://www.cambridge.org/core/books/visions-of-greater-india/transimperial-knowledge-networks-and-the-research-paradigm-of-greater-india/842136C064148FD1B5898448C25852AD
47. THE MARITIME SILK ROAD: HISTORY OF AN IDEA - ISEAS-Yusof Ishak Institute, diakses Maret 1, 2026, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/nscwps23.pdf
48. Tracing Patterns of Textiles in Ancient Java (8th–15th century) - UC Berkeley, diakses Maret 1, 2026, https://escholarship.org/content/qt16f914tm/qt16f914tm.pdf
49. VU Research Portal, diakses Maret 1, 2026, https://research.vu.nl/ws/files/42127428/complete%20dissertation.pdf